



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GANJAR PRANOWO**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **35301**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.197.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 278 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 139.000.000
5. Tanah Seluas 1178 m2 di PURBALINGGA, WARISAN Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 658 m2/56 m2 di PURBALINGGA, WARISAN Rp. 58.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.359.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, NISSAN TEANA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. MOTOR, VIAR SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI ER-6N Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.



75.000.000

6. MOBIL, TOYOTA CROWN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 415.861.750**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.002.240.559**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.974.102.309**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.974.102.309

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.